

Penguatan Kapasitas Aparatur dan Masyarakat melalui RBI untuk Tata Kelola Administrasi Publik Berkelanjutan: Evaluasi Partisipatif di Kampung Jimpitan, Batu Jaya

Ivan Budi Susetyo¹, Florentina Ratih Wulandari², Faizal Madya³, Erwin Rahmandita⁴, Irva Sectio Caesaria Satyani⁵, Puryanto⁶, Indah Wahyu Maesarini⁷, Setyani⁸, Yeni Widayastuti⁹, Aan Wahyudi¹⁰

^{1,2,3,4,5,6,7,8,9,10} Universitas Terbuka, Indonesia

Received : 06 September 2026, Revised : 29 September 2026, Published : 07 Oktober 2026

Corresponding Author

Nama Penulis: Ivan Budi Susetyo

E-mail: ivan.budi@ecampus.ut.ac.id

Abstrak

Kelurahan sebagai unit pemerintahan terdepan menentukan efektivitas pelayanan publik, partisipasi warga, dan keberhasilan pengarusutamaan gender di akar rumput, tetapi kapasitas aparatur dan integrasi sistem digital pada tataran ini masih terbatas. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat bertujuan memperkuat kapasitas aparatur dan masyarakat Kelurahan Batu Jaya, Kota Tangerang, melalui program Ruang Bersama Indonesia (RBI) dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kegiatan dilaksanakan pada 27 Agustus 2026 dengan pendekatan partisipatif-andragogis yang memadukan ceramah interaktif, diskusi kelompok, dan refleksi kertas kerja terstruktur, diikuti 30 peserta dari aparatur kelurahan, pengurus RT/RW, Pekerja Sosial Masyarakat, dan kader PKK/Posyandu/Kelompok Melati, dengan 21 kertas kerja (pengembalian 70%) sebagai unit analisis. Hasil menunjukkan tantangan tata kelola paling dominan berupa keterbatasan kompetensi sumber daya manusia aparatur (62%), rendahnya pemanfaatan teknologi informasi (48%), data kependudukan dan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang tidak mutakhir (29%), serta birokrasi berbelit (29%). Prinsip Partisipatif dinilai paling relevan, sejalan dengan tradisi gotong royong Kampung Jimpitan, diikuti Responsif Gender, Kolaboratif, Inklusif, dan Adaptif. Peserta merumuskan tindak lanjut berupa sosialisasi berjenjang, pengembangan Kampung Jimpitan, dan literasi digital pembuatan media belajar anak melalui Canva. Temuan menunjukkan bahwa RBI berpotensi menjadi instrumen tata kelola kolaboratif efektif apabila disertai penguatan kapasitas digital, integrasi data lintas sistem, dan pendampingan pascapelatihan berkelanjutan.

Kata kunci – administrasi publik, kolaborasi, pemberdayaan masyarakat, Ruang Bersama Indonesia, tata kelola kolaboratif

Abstract

The sub-district (kelurahan), as the frontline government unit, determines the effectiveness of public services, citizen participation, and grassroots gender mainstreaming, yet officials' digital capacity at this level remains limited. This community service activity strengthened the capacity of officials and residents of Kelurahan Batu Jaya, Tangerang City, through Ruang Bersama Indonesia (RBI), a national programme of the Ministry of Women's Empowerment and Child Protection. The activity was held on 27 August 2026 using a participatory, andragogical approach combining interactive lectures, group discussion, and structured worksheets, with 30 participants from sub-district officials, RT/RW administrators, community social workers, and PKK/Posyandu/Kelompok Melati cadres; 21 completed worksheets (70% response rate) were used for qualitative analysis. The most dominant governance challenges were limited human-resource competence (62%), low

This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

utilisation of information technology (48%), outdated population and social-welfare data (29%), and convoluted bureaucratic procedures (29%). The Participatory principle was rated most relevant, reflecting the Kampung Jimpitan mutual-aid tradition, followed by Gender-Responsive, Collaborative, Inclusive, and Adaptive principles. Participants proposed follow-up actions, including tiered dissemination, Kampung Jimpitan development, and Canva-based digital literacy for children's learning media. These findings suggest RBI has strong potential as an effective collaborative-governance instrument, given stronger digital capacity, cross-system data integration, and sustained post-training mentoring.

Keywords – public administration, collaboration, community empowerment, Ruang Bersama Indonesia, collaborative governance

How To Cite : Susetyo, I. B. ., Widyastuti, Y. ., Setyani, S., Maesarini, I. W. ., Puryanto, P., Satyani, I. S. C. ., Rahmandita, E. ., Madya, F. ., Wulandari, F. R. ., & Wahyudi, A. . (2026). Penguatan Kapasitas Aparatur dan Masyarakat melalui RBI untuk Tata Kelola Administrasi Publik Berkelanjutan: Evaluasi Partisipatif di Kampung Jimpitan, Batu Jaya. *Jurnal Pengabdian Sosial*, 3(12), 1266-1278. <https://doi.org/10.59837/ksj0n076>

Copyright ©2026 Ivan Budi Susetyo, Yeni Widyastuti, Setyani Setyani, Indah Wahyu Maesarini, Puryanto Puryanto, Irvia Sectio Caesaria Satyani, Erwin Rahmandita, Faizal Madya, Florentina Ratih Wulandari, Aan Wahyudi

PENDAHULUAN

Indonesia tengah berada pada masa bonus demografi yang membuka peluang strategis bagi percepatan investasi sumber daya manusia, terutama perempuan dan anak yang secara demografis mendominasi struktur penduduk, dengan proporsi perempuan sebesar 49,5 persen dari total populasi (Badan Pusat Statistik, 2024). Peluang tersebut masih dibayangi kesenjangan struktural: Indeks Ketimpangan Gender Indonesia tahun 2024 tercatat 0,421, tercermin dari Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja perempuan yang hanya 56,42 persen dibandingkan laki-laki yang mencapai lebih dari 84 persen (Badan Pusat Statistik, 2024), sementara satu dari empat perempuan usia produktif pernah mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual, dan satu dari dua anak Indonesia pernah mengalami setidaknya satu bentuk kekerasan sepanjang hidupnya (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak & Badan Pusat Statistik, 2024). Data ini menegaskan bahwa kesetaraan gender dan perlindungan anak merupakan tantangan struktural yang memerlukan intervensi tata kelola pada level pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat, yaitu desa dan kelurahan.

Sebagai unit pemerintahan terdepan, kelurahan memegang peran strategis dalam penyelenggaraan administrasi publik dasar dan pelayanan sosial (Peters, 2021), namun birokrasi pemerintahan lokal di Indonesia masih diwarnai pola kerja prosedural dan hierarkis, rendahnya responsivitas terhadap kebutuhan warga, serta terbatasnya ruang partisipasi masyarakat dalam proses administrasi dan pelayanan publik (Adia & Susetyo, 2022; Arsa & Hari Mardika, 2026; Vestikowati et al., 2020). Kondisi ini konsisten dengan temuan pada berbagai kelurahan di wilayah DKI Jakarta, antara lain lemahnya penerapan prinsip good governance dalam pelayanan publik di Kelurahan Cakung Barat (Prameswari & Susetyo, 2025) dan rendahnya kualitas anggaran daerah dalam mendukung penyediaan pelayanan di wilayah pembangunan tertinggal (Susetyo, 2014). Andrews et al., 2017 menyebut kegagalan reformasi birokrasi semacam ini sebagai *capability traps*, yaitu reformasi administratif yang formal-simbolik tanpa penguatan kapasitas nyata aparatur dan masyarakat, kondisi yang juga tampak pada implementasi kebijakan data kesejahteraan sosial berbasis desa yang masih terkendala keterbatasan SDM dan sarana teknologi (Herlinda et al., 2026).

Merespons kondisi tersebut, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) menginisiasi Program Ruang Bersama Indonesia (RBI) sebagai pengembangan lanjutan dari Desa/Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak yang telah menjangkau lebih dari 1.967 desa/kelurahan hingga tahun 2024 (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2024). RBI adalah gerakan kolaboratif lintas sektor dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang berpijak pada kearifan lokal, dijalankan secara holistik, integratif, dan berkelanjutan

(Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2025), berlandaskan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025–2029 dan Asta Cita keempat dengan visi "PERMATA EMAS: Perempuan Mandiri, Anak Terlindungi menuju Indonesia Emas 2045." Program ini mencakup tiga dimensi yaitu tata kelola responsif gender dan berbasis hak anak, pemberdayaan ekonomi-kesehatan-kepemimpinan perempuan, serta perlindungan perempuan dan anak dan diperkuat lima prinsip penyelenggaraan: Inklusif, Partisipatif, Responsif Gender, Kolaboratif, dan Adaptif. Hingga triwulan III tahun 2025, RBI telah dijalankan pada tujuh lokasi piloting nasional, salah satunya Kampung Jimpitan RT 03/RW 03 Kelurahan Batu Jaya, Kecamatan Batuaceper, Kota Tangerang (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2025).

Kelurahan Batu Jaya dipilih sebagai lokasi piloting bukan tanpa alasan: wilayah ini memiliki modal sosial yang khas berupa tradisi jimpitan yang telah lama menjadi wahana gotong royong warga, sejalan dengan temuan bahwa tradisi gotong royong berperan penting dalam membentuk karakter kolektif warga (Bintari & Darmawan, 2016), dan Kampung Jimpitan RT 03/RW 03 telah berkembang menjadi ekosistem pemberdayaan yang mencakup Ruang Pintar literasi digital anak, bank sampah, Kelompok Wanita Tani (Rusdiyana et al., 2024), sekolah lansia, posyandu, dan taman bermain anak. Namun demikian, sebagai kelurahan perkotaan padat penduduk yang tata kelolanya masih bertumpu pada pola kerja konvensional, Kelurahan Batu Jaya diduga kuat menghadapi persoalan yang lazim ditemukan pada kelurahan urban lain di Indonesia mulai dari keterbatasan kapasitas aparatur dalam pemanfaatan sistem digital dan pemutakhiran data kependudukan/Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Herlinda et al., 2026), pola birokrasi yang masih prosedural dan kurang responsif (Prameswari & Susetyo, 2025), hingga minimnya forum reflektif yang secara sistematis mendokumentasikan pemahaman aparatur dan kader terhadap kebijakan berbasis komunitas seperti RBI. Kesenjangan antara modal sosial informal yang kuat (tradisi jimpitan) dan kapasitas tata kelola formal aparatur inilah yang menjadi titik tolak urgensi kegiatan ini: tanpa penguatan kapasitas yang setara, potensi Kampung Jimpitan sebagai ruang kolaboratif RBI berisiko tidak terkelola secara berkelanjutan.

Dalam kerangka administrasi publik kontemporer, pendekatan RBI selaras dengan konsep *collaborative governance* (Ansell & Gash, 2008), yang menekankan bahwa kinerja sektor publik ditentukan oleh kemampuan institusi membangun kolaborasi lintas aktor dan ruang belajar bersama. Sejumlah kajian di Indonesia menunjukkan tata kelola kolaboratif berbasis forum deliberatif mampu memperkuat kepemilikan lokal dan keberlanjutan pembangunan desa (Fataruba, 2025; Susilowati et al., 2020; Susniwati & Yuliani, 2025), sejalan dengan prinsip perencanaan partisipatif berbasis kebutuhan masyarakat desa (Mustanir et al., 2019; Susanti et al., 2026) dan model kolaborasi lintas sektor dalam program pemberdayaan berbasis komunitas (Hidayat et al., 2024; Sari et al., 2025). Kearifan lokal juga terbukti memperkuat pelayanan dasar yang ramah kebutuhan warga pada masa penanganan Covid-19 (Santiko et al., 2021) pelajaran yang relevan bagi pemanfaatan tradisi jimpitan sebagai basis kolaboratif RBI di Batu Jaya.

Meskipun demikian, kajian empiris mengenai bagaimana prinsip dan dimensi RBI dimaknai serta dipraktikkan oleh aparatur dan masyarakat di level akar rumput masih sangat terbatas. Sebagian besar publikasi yang tersedia bersifat deskriptif-normatif dari sisi perancang kebijakan, sementara suara pelaksana lapangan termasuk pemahaman mereka atas tantangan administrasi publik riil sehari-hari belum banyak didokumentasikan secara sistematis, padahal keberhasilan kebijakan berbasis komunitas sangat bergantung pada kesesuaian antara desain kebijakan dan kapasitas serta persepsi aktor lokal yang menjalankannya (Andrews et al., 2017; Janssen & van der Voort, 2020). Kesenjangan inilah yang menjadi kebaruan kegiatan ini: alih-alih berhenti pada uraian normatif bahwa RBI penting bagi tata kelola, artikel ini menghasilkan data primer sistematis berupa kertas kerja reflektif terstruktur yang diisi langsung oleh aparatur dan kader di Kelurahan Batu Jaya sebagai bukti empiris tantangan tata kelola riil dan persepsi mereka atas relevansi lima prinsip RBI dikaitkan dengan modal sosial lokal (tradisi jimpitan) sesuatu yang belum ditemukan pada laporan pengabdian RBI sebelumnya sekaligus

merumuskan catatan kebijakan bagi Kemen PPPA dalam penyempurnaan desain implementasi RBI ke depan.

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini diselenggarakan oleh tim dosen dan mahasiswa Program Doktor Administrasi Publik, Sekolah Pascasarjana, Universitas Terbuka, di Kelurahan Batu Jaya pada 27 Agustus 2026, dengan tujuan: (1) memperkuat pemahaman aparatur dan masyarakat kelurahan terhadap konsep dan lima prinsip RBI; (2) mengidentifikasi tantangan tata kelola administrasi publik yang paling dirasakan pada level kelurahan melalui refleksi partisipatif berbasis kertas kerja; (3) memetakan prinsip RBI yang dipersepsikan paling relevan serta rencana tindak lanjut yang dirumuskan peserta; dan (4) meningkatkan keterampilan digital ibu rumah tangga dan kelompok Melati dalam merancang media belajar anak menggunakan Canva. Kegiatan ini melanjutkan rangkaian pengabdian tim yang sebelumnya berfokus pada penguatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan desa sebagai pilar desa mandiri (Susanti et al., 2026), dan diharapkan menghasilkan model evaluasi partisipatif RBI berbasis modal sosial lokal yang dapat direplikasi pada kelurahan perkotaan lain dengan karakteristik serupa.

METODE

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini dilaksanakan pada Kamis, 27 Agustus 2026, bertempat di Aula Kelurahan Batu Jaya, Kecamatan Bateuceper, Kota Tangerang, Provinsi Banten. Mitra kegiatan adalah Pemerintah Kelurahan Batu Jaya beserta pengelola Ruang Bersama Indonesia (RBI) Kampung Jimpitan RT 03/RW 03. Sasaran kegiatan berjumlah 30 peserta yang terdiri atas aparatur kelurahan, pengurus RT/RW, Pekerja Sosial Masyarakat, kader kelompok Melati dan Posyandu/PKK, serta penggerak Kampung Jimpitan, mewakili sedikitnya delapan wilayah RT dan lima wilayah RW, sehingga keterwakilan peserta relatif merata dari berbagai wilayah kelurahan, tidak hanya dari lokus piloting Kampung Jimpitan semata.

Identifikasi permasalahan mitra dilakukan melalui koordinasi dengan Kemen PPPA untuk memperoleh arahan substansi RBI (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2025), dilanjutkan dengan komunikasi awal dan observasi lapangan bersama Pemerintah Kelurahan Batu Jaya guna memetakan kebutuhan penguatan tata kelola administrasi publik dan literasi digital warga. Dari proses tersebut teridentifikasi dua kebutuhan prioritas, yaitu penguatan pemahaman aparatur terhadap prinsip tata kelola RBI dan peningkatan keterampilan digital perempuan dalam menghasilkan media belajar anak.

Metode pelaksanaan menggunakan pendekatan partisipatif dan andragogi (Ansell & Gash, 2008; Eli et al., 2026; Rahmawati & Hiryanto, 2023), yang memosisikan aparatur dan masyarakat sebagai subjek pembelajaran aktif dan tim PkM sebagai fasilitator. Kegiatan dilaksanakan dalam empat tahap.

Tahap pertama, analisis situasi dan kebutuhan, mencakup koordinasi lintas pemangku kepentingan dan penyusunan modul materi. Tahap kedua, pelatihan dan pendampingan teknis yang berlangsung dalam dua sesi tatap muka: (a) sesi penguatan tata kelola administrasi publik kelurahan berbasis empat pilar akuntabel, transparan, partisipatif, dan responsif, disampaikan melalui ceramah interaktif dan diskusi kepada aparatur dan pengurus RT/RW; serta (b) sesi pelatihan desain Canva untuk media belajar anak bagi ibu rumah tangga dan kelompok Melati, mencakup lima langkah dasar menentukan ukuran desain, mencari templat, menambahkan elemen visual, mengedit tata letak, dan mengunduh hasil dalam format siap cetak, disertai tips memilih satu tujuan belajar sederhana dan merancang aktivitas 10–15 menit sesuai usia anak.

Tahap ketiga, kolaborasi akademisi dengan pemerintah kelurahan, di mana tim akademisi Universitas Terbuka berperan memberikan landasan teoretis, modul pelatihan, dan fasilitasi diskusi, sementara Pemerintah Kelurahan Batu Jaya menghadirkan konteks kebijakan serta kebutuhan riil implementasi RBI di lapangan. Pada tahap ini, setiap peserta menerima satu lembar kerja (*worksheet*) individual yang memuat pertanyaan reflektif mengenai tantangan tata kelola di lingkungan kelurahan

This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

dan rencana penerapan prinsip RBI. Pengisian lembar kerja dilakukan dalam forum kelompok kecil beranggotakan lima hingga enam peserta sesuai prinsip *forum group discussion* (Afiyanti, 2008; Sadiyah et al., 2024): peserta lebih dahulu berdiskusi dan saling bertukar pandangan dalam kelompok dengan pendampingan langsung anggota tim PkM, kemudian masing-masing peserta menuliskan refleksi dan rencana tindak lanjutnya sendiri pada lembar kerja individu. Dengan demikian, sifat kolaboratif terletak pada proses diskusi dan penguatan pemahaman bersama sebelum pengisian, sedangkan hasil akhir yang terkumpul tetap berupa lembar kerja individual bukan satu lembar kerja per kelompok sehingga jumlah lembar kerja yang terkumpul dapat dibandingkan langsung dengan jumlah peserta yang hadir.

Tahap keempat, evaluasi dan tindak lanjut dilaksanakan melalui analisis isi kualitatif terhadap lembar kerja peserta yang terkumpul. Dari 30 peserta yang mengikuti pelatihan, sebanyak 21 lembar kerja individual berhasil dihimpun dan diisi baik secara lengkap maupun sebagian, sehingga tingkat pengembalian instrumen (*response rate*) sebesar 70 persen; sembilan peserta lainnya tidak mengumpulkan lembar kerja karena keterbatasan waktu menjelang penutupan acara. Lembar kerja tersebut selanjutnya menjadi bahan evaluasi utama kegiatan dan dianalisis menggunakan analisis isi kualitatif dengan kombinasi kategori deduktif, yaitu lima prinsip dan tiga dimensi resmi RBI (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2025), serta kategori induktif yang muncul dari isian peserta. Proses pengodean dilakukan oleh dua anggota tim secara independen, kemudian didiskusikan untuk mencapai kesepakatan kategori guna menjaga kredibilitas temuan. Pendekatan evaluasi partisipatif berbasis lembar kerja ini merujuk pada model evaluasi pelatihan aparatur yang mengintegrasikan evaluasi pelatihan, motivasi kerja, dan tata kelola birokrasi dalam mengukur peningkatan kompetensi peserta (Susetyo, 2025), pengembangan model evaluasi pelatihan berbasis kompetensi bagi aparatur perencana (Susetyo et al., 2023), serta temuan bahwa motivasi kerja turut memengaruhi disiplin dan kinerja aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas pelayanan (Cahyani & Susetyo, 2024).

Keberhasilan kegiatan diukur melalui lima indikator yang masing-masing bersumber dari instrumen evaluasi yang berbeda, sebagai berikut. Pertama, tingkat keterlibatan peserta, dinilai dari daftar hadir dan pengamatan langsung fasilitator selama sesi ceramah dan diskusi kelompok berlangsung. Kedua, kelengkapan pengisian lembar kerja, dinilai dari jumlah dan kualitas isian pada 21 lembar kerja yang terkumpul dibandingkan dengan jumlah peserta yang hadir. Ketiga, kemampuan peserta merumuskan rencana aksi penerapan prinsip RBI, dinilai dari kejelasan dan kekonkretan jawaban pada bagian rencana tindak lanjut di lembar kerja individu. Keempat, kemampuan peserta perempuan mempraktikkan lima langkah dasar Canva, dinilai dari pengamatan langsung fasilitator terhadap hasil desain media belajar yang berhasil dibuat peserta selama sesi praktik. Kelima, kejelasan rencana tindak lanjut pasca pelatihan, dinilai dari kesesuaian antara rencana yang dirumuskan peserta dalam lembar kerja dengan konteks kebutuhan Kelurahan Batu Jaya yang telah dipetakan pada tahap identifikasi kebutuhan mitra. Kelima indikator ini digunakan secara bersama-sama untuk menilai ketercapaian tujuan kegiatan, sekaligus menjadi dasar penyusunan bagian hasil dan pembahasan pada artikel ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan dibuka oleh Lurah Batu Jaya, Sulthon, S.H.I., didampingi Sekretaris Lurah Nashrullah, S.Ag., dan dihadiri unsur Kepala Seksi dan staf kelurahan, pengurus RT/RW, Pekerja Sosial Masyarakat, kelompok Melati, serta penggerak Kampung Jimpitan. Dalam sambutannya, Lurah menyampaikan bahwa Kampung Jimpitan RT 03/RW 03 telah ditetapkan sebagai satu dari tujuh lokasi piloting RBI nasional, yang menghidupkan kembali tradisi gotong royong "jimpitan" warga sebagai landasan pembangunan ruang inklusif ramah perempuan dan anak, dilengkapi fasilitas Ruang Pintar literasi digital anak, program ekonomi bank sampah dan Kelompok Wanita Tani, serta layanan sosial berupa sekolah lansia, posyandu, dan taman bermain anak. Sebanyak 30 peserta hadir mewakili

This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

berbagai unsur dan wilayah RT/RW secara merata, dengan 21 di antaranya mengisi lembar kerja (lengkap maupun sebagian) yang menjadi bahan evaluasi utama kegiatan ini.

Pada bagian lembar kerja mengenai pemahaman konsep Ruang Bersama Indonesia, jawaban peserta menunjukkan derajat konvergensi yang cukup tinggi dengan definisi resmi Kemen PPPA, meskipun dengan tingkat elaborasi yang bervariasi. Sebagian besar peserta secara konsisten mengaitkan RBI dengan tiga unsur inti, yaitu gerakan kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lain; fokus pada pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; serta semangat gotong royong dan kearifan lokal sebagai basis pelaksanaannya. Sejumlah peserta bahkan merumuskan definisi yang cukup komprehensif, misalnya menyebut RBI sebagai kolaborasi masyarakat, pemerintah, dan pemangku kepentingan untuk bersama menyelesaikan masalah sosial agar warga tidak bergantung pada bantuan dan dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga. Peserta lain memaknai RBI secara lebih operasional, yaitu "kerja lapangan, jalan terus, *door to door*" bagi warga miskin, lansia terlanjar, dan kelompok rentan lainnya, pemaknaan yang menegaskan bahwa RBI dipahami bukan sekadar konsep normatif, melainkan praksis pelayanan aktif berbasis empati. Meski demikian, ditemukan pula variasi pemahaman yang lebih dangkal pada peserta dengan paparan informasi terbatas, yang cenderung menyamakan RBI dengan program bantuan sosial umum semata. Karena kegiatan ini tidak menerapkan pengukuran pemahaman sebelum dan sesudah pelatihan, temuan tersebut tidak dapat dimaknai sebagai bukti peningkatan pemahaman, melainkan sebagai gambaran kondisi pemahaman peserta pascakegiatan. Gambaran ini tetap bermakna bagi keberhasilan kegiatan: konvergensi pemahaman pada mayoritas peserta mengindikasikan bahwa tujuan pertama kegiatan, yaitu penguatan pemahaman konsep dan prinsip RBI, tersampaikan secara memadai pada sebagian besar peserta, sementara variasi pemahaman dangkal pada sebagian kecil lainnya menunjukkan bahwa target tersebut belum tercapai secara merata dan memerlukan mekanisme sosialisasi lanjutan yang lebih terstruktur dan berjenjang agar tidak berhenti pada peserta yang hadir pada satu sesi pelatihan.

Hasil analisis isi terhadap lembar kerja identifikasi tantangan mengungkap sepuluh kategori tantangan tata kelola administrasi publik yang dirasakan peserta, dengan frekuensi kemunculan sebagaimana disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Kategori Tantangan Tata Kelola Administrasi Publik menurut Peserta

No	Kategori Tantangan*	n (dari 21)	%
1	Keterbatasan kompetensi dan kuantitas SDM aparatur	13	62%
2	Rendahnya pemanfaatan dan integrasi teknologi informasi	10	48%
3	Data kependudukan dan DTKS tidak mutakhir	6	29%
4	Birokrasi berbelit, prosedural, dan hierarkis	6	29%
5	Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik	5	24%
6	Lemahnya koordinasi lintas RT/RW/lembaga	4	19%
7	Lemahnya transparansi dan akuntabilitas layanan	4	19%
8	Kualitas dan sikap layanan (keramahan, kecepatan)	3	14%
9	Minimnya sensitivitas gender dalam layanan	2	10%
10	Keterbatasan sarana dan prasarana	2	10%

*Kategori tantangan tata kelola administrasi publik menurut peserta (n = 21 dari 30; jawaban bersifat multirespons sehingga total persentase melebihi 100%).

Temuan ini sejalan dengan diagnosis bahwa kapasitas aparatur yang terbatas dan lemahnya integrasi sistem menjadi akar masalah tata kelola desa/kelurahan (Arsa & Hari Mardika, 2026; Hattab et al., 2022; Vestikowati et al., 2020), serta konsisten dengan temuan pada pengelolaan Data Terpadu

Kesejahteraan Sosial di tingkat desa yang juga menghadapi kendala keterbatasan SDM, sarana teknologi, dan prosedur birokrasi berlapis (Herlinda et al., 2026). Kendala integrasi teknologi dan data kependudukan yang teridentifikasi pada Tabel 1 juga sejalan dengan temuan pada layanan kependudukan berbasis aplikasi digital di kelurahan lain wilayah DKI Jakarta yang belum sepenuhnya efektif (Cantika & Susetyo, 2022), rendahnya efektivitas pelayanan digital berbasis formulir daring pada instansi teknis (Priati & Susetyo, 2023), serta penyaluran bantuan sosial berbasis data terpadu seperti Program Keluarga Harapan yang efektivitasnya sangat bergantung pada akurasi data penerima manfaat (Oktaviani & Susetyo, 2022). Bagi keberhasilan kegiatan dan penyelesaian masalah mitra, temuan ini memiliki makna ganda. Pertama, ia mengonfirmasi bahwa kebutuhan prioritas yang telah dipetakan tim PkM bersama Pemerintah Kelurahan Batu Jaya pada tahap identifikasi awal yaitu penguatan tata kelola administrasi memang relevan dan dirasakan langsung oleh aparatur, sehingga materi pelatihan yang diberikan telah menyasar persoalan riil, bukan asumsi sepihak tim pelaksana. Kedua, dominasi keterbatasan SDM dan integrasi digital dibandingkan isu sensitivitas gender itu sendiri menjadi catatan penting bagi keberlanjutan RBI di Batu Jaya: karena RBI dirancang terutama untuk memperkuat dimensi responsivitas gender dan perlindungan anak, sementara pada level implementasi keberhasilannya justru sangat bergantung pada penyelesaian persoalan tata kelola administratif yang lebih mendasar, maka pelatihan satu hari yang diselenggarakan tim PkM baru menjadi langkah awal dan belum memadai untuk menuntaskan akar persoalan tersebut, sehingga pendampingan lanjutan menjadi prasyarat, bukan pilihan tambahan, bagi keberhasilan program di lokasi ini.

Peserta juga diminta memilih dan mengelaborasi satu dari lima prinsip RBI yang dinilai paling relevan diterapkan di Kelurahan Batu Jaya. Karena setiap peserta hanya memilih satu prinsip, total frekuensi pilihan sama dengan jumlah lembar kerja yang dianalisis ($n = 21$). Hasil pengodean menunjukkan urutan relevansi sebagaimana disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Prinsip RBI yang Dipersepsikan Paling Relevan menurut Peserta

No	Prinsip RBI*	n (dari 21)	%
1	Partisipatif	8	38%
2	Responsif Gender	5	24%
3	Kolaboratif	4	19%
4	Inklusif	3	14%
5	Adaptif	1	5%

*Prinsip RBI yang dipersepsikan paling relevan menurut peserta (hasil analisis isi lembar kerja, $n = 21$ dari 30 peserta pelatihan; setiap peserta memilih satu prinsip sehingga total $n = 21$ dan total persentase = 100%).

Dominannya prinsip Partisipatif sejalan dengan basis sosial Kampung Jimpitan yang memang lahir dari tradisi gotong royong warga (Bintari & Darmawan, 2016), sehingga fondasi partisipasi sosial sesungguhnya telah tersedia secara kultural jauh sebelum RBI diperkenalkan secara formal. Temuan ini memperkuat argumen (Ansell & Gash, 2008) bahwa *collaborative governance* akan lebih mudah melembaga apabila dibangun di atas modal sosial yang telah ada, bukan diciptakan dari nol, sebagaimana juga ditunjukkan pada model tata kelola kolaboratif berbasis forum deliberatif di desa lain (Susilowati et al., 2020; Susniwati & Yuliani, 2025), serta konsisten dengan pentingnya keterlibatan warga sejak tahap perencanaan hingga evaluasi pelayanan pada studi penerapan prinsip *good governance* di Kelurahan Cakung Barat, Jakarta Timur (Prameswari & Susetyo, 2025). Bagi keberlanjutan RBI di Batu Jaya, temuan ini memiliki implikasi praktis yang jelas: karena prinsip Partisipatif dan Responsif Gender bersama-sama dipilih oleh lebih dari separuh peserta (62%), strategi penguatan RBI ke depan sebaiknya dirancang dengan memanfaatkan mekanisme partisipasi yang sudah berjalan melalui tradisi jimpitan, alih-alih memperkenalkan forum kolaborasi baru yang berisiko tumpang tindih dengan struktur sosial yang sudah ada. Peran konkret yang disebutkan peserta terbagi ke dalam

lima kategori, yaitu diseminasi informasi bagi kelompok rentan; pendampingan ekonomi UMKM dan usaha perempuan; edukasi dan pemantauan kesehatan melalui Posyandu; penguatan ketahanan keluarga melalui pendekatan "kerja hati" Pekerja Sosial Masyarakat; serta dukungan teknis-administratif seperti data terpilah gender dan anak. Pola ini menegaskan orientasi peran sosial-relasional, bukan sekadar administratif-formal, sebagai kekuatan tersendiri bagi keberlanjutan RBI berbasis komunitas (Ardiansyah & Budiono, 2022; Naenggolan et al., 2024).

Rencana tindak lanjut yang dirumuskan peserta memperlihatkan komitmen yang cukup konkret, meliputi sosialisasi hasil pelatihan secara berjenjang kepada RT/RW dalam rentang satu hingga dua minggu pascapelatihan; pengembangan Kampung Jimpitan sebagai ruang belajar dan ekonomi warga melalui bazar UMKM, penguatan program bank sampah sebagai instrumen pengelolaan sampah sekaligus pemberdayaan ekonomi warga (Wahyudin & Susetyo, 2024), pojok baca, dan pelatihan keterampilan ekonomi bagi ibu rumah tangga; penguatan koordinasi rutin dengan RT/RW, PKK, dan tokoh masyarakat; pemetaan dan pemutakhiran data kelompok rentan; serta rencana pengembangan jangka panjang Kampung Jimpitan menjadi eco park dan pusat edukasi warga. Rencana yang menyebut secara spesifik waktu, pihak yang dilibatkan, dan tujuan pada sebagian lembar kerja menunjukkan tingkat kesiapan operasional yang cukup matang, meskipun pada peserta lain rencana tindak lanjut masih dirumuskan secara umum dan belum terjadwal. Variasi kematangan rencana ini penting dimaknai sebagai indikator keberhasilan kegiatan yang bersifat parsial: kegiatan berhasil mendorong sebagian peserta merumuskan langkah nyata yang dapat langsung ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kelurahan, tetapi belum berhasil menyeragamkan kesiapan seluruh peserta, sehingga peran pendampingan pascapelatihan dari tim akademisi maupun Kemen PPPA tetap diperlukan agar rencana yang masih umum tidak berhenti sebagai wacana.

Sesi kedua kegiatan berfokus pada penguatan literasi digital perempuan dan pengurus kelompok Melati melalui pelatihan pembuatan media belajar anak menggunakan aplikasi Canva. Analisis terhadap lembar kerja bagian kedua menunjukkan dua temuan penting. Pertama, dari sisi substansi materi, tema media belajar yang paling banyak diusulkan peserta adalah pengenalan huruf (termasuk huruf hijaiyah), angka, warna, bentuk, hewan, serta kebiasaan baik dan tata krama anak materi yang relevan dengan tahap perkembangan anak usia dini hingga sekolah dasar dan konsisten dengan tujuan pemenuhan hak anak dalam kerangka RBI. Kedua, dari sisi kompetensi teknis, ditemukan kesenjangan literasi digital yang cukup nyata: peserta yang mampu menuliskan lima langkah dasar Canva secara runtut dan lengkap hanya sebagian dari total peserta, sementara sejumlah lembar kerja lain belum terisi lengkap pada butir praktik lanjutan. Karena kegiatan tidak mengukur kemampuan peserta sebelum pelatihan, temuan ini menunjukkan gambaran capaian keterampilan pascapelatihan, bukan bukti peningkatan keterampilan secara terukur. Gambaran tersebut sejalan dengan literatur yang menunjukkan bahwa pelatihan desain berbasis aplikasi daring yang sederhana dan kontekstual berpotensi memperkuat keterampilan digital perempuan (Purwati & Perdanawati, 2019), sekaligus menjadi salah satu upaya konkret menjembatani kesenjangan literasi digital berbasis gender yang selama ini masih menghambat partisipasi perempuan dalam pemanfaatan teknologi (Aqurini & Lisnawati, 2024; Fradana et al., 2025; Salsabila & Wachidah, 2024). Bagi penyelesaian masalah mitra, temuan ini menegaskan bahwa tujuan kedua kegiatan penguatan keterampilan digital perempuan tercapai sebagian: peserta memperoleh paparan awal yang relevan dengan kebutuhan Kampung Jimpitan sebagai ruang literasi digital anak, tetapi kesenjangan pada praktik lanjutan menunjukkan bahwa satu sesi pelatihan belum cukup untuk menghasilkan kemandirian teknis, kemungkinan besar disebabkan oleh keterbatasan waktu sesi praktik dan variasi tingkat literasi digital dasar antarpeserta yang berbeda usia dan latar belakang pendidikan, sehingga pendampingan lanjutan berbasis Ruang Pintar yang sudah tersedia di Kampung Jimpitan menjadi langkah tindak lanjut yang paling relevan untuk direkomendasikan kepada mitra.

Temuan-temuan di atas, jika dibaca secara terpadu, menunjukkan bahwa RBI di Kelurahan Batu Jaya berada pada fase awal institusionalisasi yang menjanjikan namun masih memerlukan

penopang struktural. Di satu sisi, modal sosial partisipatif Kampung Jimpitan dan pemahaman substantif tentang RBI pada sebagian besar peserta menjadi fondasi kuat bagi keberlanjutan program, dan menjadi bukti bahwa kegiatan ini berhasil menegaskan kembali serta memperkuat basis pemahaman yang telah dimiliki mitra. Di sisi lain, dominasi tantangan keterbatasan SDM dan rendahnya integrasi digital (Tabel 1) menegaskan bahwa RBI tidak dapat berdiri sendiri sebagai program pemberdayaan gender dan anak semata, melainkan harus terintegrasi dengan agenda reformasi administrasi publik yang lebih luas, sejalan dengan capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ke-16 tentang institusi yang efektif, akuntabel, dan inklusif (Perserikatan Bangsa-Bangsa, 2023) serta prinsip tata kelola digital yang adaptif dan responsif terhadap dinamika krisis maupun kebutuhan layanan (Janssen & van der Voort, 2020; Wulandari et al., 2025).

Berdasarkan temuan tersebut, artikel ini mengajukan lima catatan kebijakan bagi Kemen PPPA dalam penyempurnaan desain implementasi RBI ke depan. Pertama, penguatan kapasitas SDM aparatur perlu menjadi prasyarat, bukan komponen paralel, dalam paket implementasi RBI, mengingat 62 persen peserta mengidentifikasi keterbatasan SDM sebagai tantangan utama. Kedua, RBI perlu didukung kebijakan integrasi data lintas sistem, khususnya antara data kependudukan dan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, mengingat hampir separuh peserta (48%) mengeluhkan sistem yang belum terintegrasi, sejalan dengan pentingnya inovasi integrasi data dan partisipasi masyarakat dalam layanan berbasis data terpadu (Islah et al., 2026) serta penguatan kompetensi perencana dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan yang berkualitas dan berbasis data (Susetyo & Rahmandita, 2025). Ketiga, mekanisme sosialisasi RBI perlu dirancang secara berjenjang dan berkelanjutan, bukan pelatihan satu kali, untuk mengatasi variasi pemahaman substantif serta menjembatani kesenjangan literasi digital yang teridentifikasi pada praktik Canva. Keempat, Kemen PPPA perlu mempertimbangkan skema pendampingan pascapelatihan yang terjadwal, mengingat rencana tindak lanjut peserta menunjukkan kesiapan operasional yang bervariasi dan berisiko tidak terealisasi tanpa pendampingan berkelanjutan dari perguruan tinggi mitra. Kelima, keberadaan modal sosial partisipatif berbasis tradisi lokal seperti jimpitan sebaiknya dijadikan basis strategi replikasi RBI di lokasi lain, dengan terlebih dahulu memetakan modal sosial serupa arisan, gotong royong, kelompok pengajian sebagai *entry point* kolaborasi, alih-alih menerapkan model RBI secara seragam tanpa mempertimbangkan konteks lokal.

Sebagai catatan keterbatasan, evaluasi pada kegiatan ini bertumpu pada 21 lembar kerja dari 30 peserta (response rate 70%), sehingga temuan belum sepenuhnya merepresentasikan seluruh peserta pelatihan, dan intensitas kegiatan yang berlangsung dalam satu hari turut membatasi kedalaman pendampingan teknis, khususnya pada praktik Canva lanjutan. Kegiatan dan pengabdian lanjutan disarankan menerapkan pendampingan bertahap dengan evaluasi berkala pascapelatihan serta upaya peningkatan tingkat pengembalian instrumen agar akumulasi hasil lapangan menjadi basis yang lebih kuat bagi penyempurnaan kebijakan RBI secara nasional.



Gambar 1. Kegiatan PkM di Kelurahan Batu Jaya, Kecamatan Batuaceper, Kota Tangerang

KESIMPULAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat di Kelurahan Batu Jaya menunjukkan bahwa Ruang Bersama Indonesia (RBI) berpotensi menjadi instrumen efektif bagi penguatan tata kelola administrasi publik yang inklusif, partisipatif, dan responsif gender di tingkat kelurahan. Dari 30 peserta pelatihan, 21 di antaranya menghasilkan lembar kerja reflektif yang menunjukkan bahwa aparaturnya dan masyarakat pada umumnya telah memiliki pemahaman substantif yang cukup baik tentang esensi RBI sebagai gerakan kolaboratif berbasis kearifan lokal, serta mampu mengidentifikasi prinsip Partisipatif sebagai prinsip yang paling relevan diterapkan, sejalan dengan tradisi gotong royong Kampung Jimpitan yang telah lama hidup di wilayah tersebut. Namun demikian, keberhasilan RBI ke depan sangat bergantung pada penyelesaian tantangan tata kelola administratif yang lebih mendasar, terutama keterbatasan kompetensi SDM aparaturnya (62%) dan rendahnya integrasi sistem digital (48%), yang justru menjadi tantangan paling dominan dibandingkan isu sensitivitas gender itu sendiri. Pada sesi literasi digital, kegiatan ini menunjukkan bahwa ibu rumah tangga dan kelompok Melati mampu memperoleh paparan awal dan mempraktikkan dasar-dasar perancangan media belajar anak menggunakan Canva, sekalipun sebagian lembar kerja menunjukkan kesenjangan pada butir praktik lanjutan, sehingga capaian sesi ini tergolong sebagai langkah awal penguatan literasi digital, bukan penguasaan keterampilan yang telah tuntas. Data yang bertumpu pada 21 lembar kerja dari total 30 peserta ini menggambarkan kondisi dan persepsi peserta pascakegiatan pada satu titik waktu, sehingga temuan tersebut belum dapat dimaknai sebagai bukti perubahan atau peningkatan dibandingkan kondisi sebelum pelatihan, dan perlu dibaca sebagai potret awal yang menjadi dasar bagi langkah penguatan lanjutan, bukan sebagai kesimpulan final atas keberhasilan program secara menyeluruh. Temuan ini menegaskan pentingnya memposisikan RBI bukan sebagai program yang berdiri sendiri, melainkan sebagai bagian integral dari agenda reformasi administrasi publik dan transformasi digital pemerintahan desa/kelurahan secara lebih luas.

Berdasarkan temuan tersebut, kegiatan ini merekomendasikan lima langkah keberlanjutan yang secara spesifik merespons kondisi Kelurahan Batu Jaya. Pertama, bagi Kemen PPPA, modul pelatihan RBI perlu memasukkan materi penguatan tata kelola administrasi dasar (tertib data, digitalisasi layanan, dan penyederhanaan prosedur) sebagai bagian tidak terpisahkan dari materi RBI, mengingat keterbatasan SDM dan integrasi digital tercatat sebagai tantangan yang lebih dominan dibandingkan isu sensitivitas gender itu sendiri. Kedua, bagi Pemerintah Kelurahan Batu Jaya, perlu segera dilakukan pemetaan dan pemutakhiran data kependudukan serta Data Terpadu Kesejahteraan Sosial secara berkala, sejalan dengan keluhan hampir separuh peserta atas data yang belum termutakhirkan. Ketiga, sosialisasi hasil pelatihan perlu dilakukan secara berjenjang kepada RT/RW yang belum terwakili langsung dalam kegiatan ini, guna mengatasi variasi pemahaman substantif tentang RBI yang masih ditemukan pada sebagian peserta. Keempat, tim akademisi Universitas Terbuka bersama Pemerintah Kelurahan disarankan menyelenggarakan sesi pendampingan lanjutan berbasis Ruang Pintar Kampung Jimpitan, khusus untuk menuntaskan praktik Canva pada butir yang belum lengkap diisi peserta, sekaligus memantau realisasi rencana tindak lanjut yang telah dirumuskan agar tidak berhenti sebagai dokumen kertas kerja. Kelima, keberadaan modal sosial partisipatif berbasis tradisi jimpitan di Kampung Jimpitan RT 03/RW 03 sebaiknya dijadikan model rujukan replikasi RBI, dengan terlebih dahulu memetakan modal sosial serupa seperti arisan, kelompok pengajian, atau tradisi gotong royong lain pada kelurahan perkotaan berkarakteristik sebanding sebagai titik masuk kolaborasi, sebelum RBI diterapkan secara seragam tanpa mempertimbangkan konteks lokal masing-masing wilayah..

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim penulis menyampaikan terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Terbuka atas dukungan pendanaan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun 2026; Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia atas

This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

arahan substansi program Ruang Bersama Indonesia; Pemerintah Kelurahan Batu Jaya beserta Lurah Sulthon, S.H.I. dan Sekretaris Lurah Nashrullah, S.Ag.; serta seluruh pengurus RT/RW, Pekerja Sosial Masyarakat, kader Posyandu/PKK dan kelompok Melati, dan penggerak Kampung Jimpitan atas partisipasi aktif dan keterbukaan dalam kegiatan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Adia, V. R., & Susetyo, I. B. (2022). *Birokrasi dan Governansi Publik* | i (M. Hidayat, Miskadi, & Yogi Setiawan, Eds.; Pertama).
- Afiyanti, Y. (2008). Focus Group Discussion (Diskusi Kelompok Terfokus) sebagai Metode Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif. *Jurnal Keperawatan Indonesia*, 12(1), 58–62. <https://doi.org/10.7454/jki.v12i1.201>
- Andrews, M., Pritchett, L., & Woolcock, M. (2017). *Building State Capability: Evidence, Analysis, Action*. Oxford University Press.
- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative Governance in Theory and Practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Aquarini, A., & Lisnawati, L. (2024). Analisis perbandingan literasi digital dan kompetensi profesional ASN berdasarkan gender di Kalimantan Tengah. *Equalita: Jurnal Studi Gender dan Anak*, 6(2), 140–161. <https://doi.org/10.24235/equalita.v6i2.18971>.
- Ardiansyah, M. F., & Budiono, T. D. (2022). Peran agent of change dalam pemberdayaan perempuan di Desa Pitusunggu Sulawesi Selatan. *Nuansa: Jurnal Studi Islam dan Kemasyarakatan*, 15(1), 40–52. <https://doi.org/10.29300/nuansa.v15i1.3622>
- Arsa, Y., & Hari Mardika, I. (2026). Evaluasi Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa dalam Penggunaan Aplikasi. *Kajian Administrasi Publik Dan Ilmu Komunikasi*, 3(02), 19–27. <https://doi.org/10.62383/kajian.v3i2.1009>
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Indonesia 2024*. <https://www.worldbank.org/en/research/commodity-markets>
- Bintari, P. N., & Darmawan, C. (2016). Peran pemuda sebagai penerus tradisi sambatan dalam rangka pembentukan karakter gotong royong. *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, 25(1), 57–76. <https://doi.org/10.17509/jpis.v25i1.3670>
- Cahyani, M., & Susetyo, I. B. (2024). Pengaruh gaya kepemimpinan dan motivasi kerja terhadap disiplin kerja pegawai negeri sipil pada Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Selatan tahun 2023. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 4(3), 243–251. <https://doi.org/10.31334/jiap.v4i3.3842>
- Cantika, M., & Susetyo, I. B. (2022). Analisis efektivitas layanan kependudukan dengan menggunakan aplikasi Alpukat Betawi di Kelurahan Johar Baru. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 2(6), 618–626. <https://doi.org/10.31334/jiap.v2i6.2970>
- Eli, Ridwan, I., Salama, S., & Nursaidah, N. (2026). Strategi pembelajaran andragogi dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Panrita. *Journal of Humanities, Social Sciences, and Education*, 1(11), 78–89. <https://doi.org/10.64690/jhuse.v1i11.655>
- Fataruba, M. (2025). Model kolaboratif dalam tata kelola pemerintahan. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 1(4), 1561–1576. <https://doi.org/10.63822/6w73m997>
- Fradana, A. F., Kumala, C., & Alfira, N. (2025). Pendidikan inklusif untuk kesetaraan gender: Strategi pemberdayaan perempuan melalui kurikulum dan literasi digital. *Jurnal Pendidikan Dirgantara*, 2(2), 216–222. <https://doi.org/10.61132/jupendir.v2i2.298>
- Hattab, S., Daswati, D., & Rachmad, R. (2022). Sosialisasi peningkatan kapasitas aparatur dalam pembangunan Desa Kanuna Kecamatan Kinovaro Kabupaten Sigi. *Publikasi Ilmiah Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat (SIKEMAS)*, 1(3), 117–122. <https://doi.org/10.47353/sikemas.v1i3.542>

- Herlinda, D., Nielwaty, E., & Elsi, M. (2026). Implementasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di Desa Pangkalan Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. *Al Mikraj: Jurnal Studi Islam Dan Humaniora*, 6(1), 1708–1722. <https://doi.org/10.37680/almikraj.v6i1.8997>
- Hidayat, M., Alhabib, A., Azzahra, S., Muhammad, M., Khair, M., & Jufri, F. M. (2024). Pemberdayaan masyarakat desa melalui pendampingan sertifikat halal usaha mikro kecil menengah (UMKM) di Desa Tinggede Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi. *PENGABDI: Jurnal Hasil Pengabdian Masyarakat*, 5(1), 72–78. <https://doi.org/10.26858/pengabdi.v5i1.63313>
- Islah, K., Susetyo, I. B., & Kumala, R. (2026). Analysis of community participation and empowerment in the innovation of one food data integration services. *Transparansi: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 9(1), 393–402. <https://doi.org/10.31334/ntx8k142>
- Janssen, M., & van der Voort, H. (2020). Agile and adaptive governance in crisis response: Lessons from the COVID-19 pandemic. *International Journal of Information Management*, 55, 102180. <https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2020.102180>
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, & Badan Pusat Statistik. (2024). *Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) dan Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja (SNPHAR) 2024*.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2024). *Perempuan perintis, penggerak Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA)*. <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/siaran-pers/perempuan-perintis-penggerak-desa-ramah-perempuan-dan-peduli-anak-drppa>
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2025). *Petunjuk teknis Ruang Bersama Indonesia*. https://ppid.kemenpppa.go.id/uploads/informasi/publik/berkala_1746588084.pdf
- Mustanir, A., Hamid, H., & Syarifuddin, R. N. (2019). Pemberdayaan kelompok masyarakat desa dalam perencanaan metode partisipatif. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 5(3), 227–239. <https://doi.org/10.25147/moderat.v5i3.2677>
- Oktaviani, L., & Susetyo, I. B. (2022). Analisis efektivitas penyaluran bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga di Kelurahan Kayu Putih Jakarta Timur tahun 2021. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 2(3), 307–318. <https://doi.org/10.31334/jiap.v2i3.2933>
- Perserikatan Bangsa-Bangsa. (2023). *Transforming our world: Progress towards the Sustainable Development Goals*.
- Peters, B. G. (2021). *Advanced Introduction to Public Policy* (2nd ed.). Edward Elgar Publishing.
- Prameswari, R., & Susetyo, I. B. (2025). Analisis penerapan prinsip-prinsip good governance dalam pemberian pelayanan publik (Studi pada Kelurahan Cakung Barat Kecamatan Cakung Kota Jakarta Timur). *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(2), 164–171. <https://doi.org/10.31334/jiap.v5i2.4720>
- Priati, Y., & Susetyo, I. B. (2023). Analisis efektifitas pelaksanaan pelayanan digital berbasis Google Form di Suku Dinas Kesehatan Jakarta Barat. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(5), 522–530.
- Purwati, Y., & Perdanawanti, L. (2019). Pelatihan desain menggunakan aplikasi Canva untuk anggota Komunitas Ibu Profesional Banyumas Raya. *Jurnal Pengabdian Mitra Masyarakat*, 1(1), 42–51. <https://doi.org/10.35671/jpmm.v1i1.821>
- Rahmawati, Y. I., & Hiryanto. (2023). Implications of the andragogy concept in various community education settings: A literature review. *Jurnal EMPOWERMENT*, 12(2), 85–96. <https://doi.org/10.22460/empowerment.v12i2.3916>
- Rusdiyana, E., Sugihardjo, Setyowati, R., Widiyanto, & Lestari, E. (2024). Pemberdayaan masyarakat melalui inisiasi bank sampah. *Jurnal Inovasi Hasil Pengabdian Masyarakat (JIPEMAS)*, 7(3), 703–719. <https://doi.org/10.33474/jipemas.v7i3.21259>

- Sadiyah, K., Farida, Y. E., Saefudin, A., Hana, M. M., & Mahfud, A. (2024). Workshop manajemen organisasi dan penyusunan modul dolanan anak bagi Forum Taman Baca Masyarakat (FTBM) di Kabupaten Jepara. *Jurnal Pengabdian UNDIKMA*, 5(1), 90–99. <https://doi.org/10.33394/jpu.v5i1.6008>
- Salsabila, C. K., & Wachidah, K. (2024). Pola kemampuan literasi digital guru: Menelaah kesenjangan literasi digital dari perspektif gender. *Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Sekolah Dasar*, 12(2), 322–338. <https://doi.org/10.22219/jp2sd.v12i2.34862>
- Santiko, A., Susetyo, I. B., Agustina, D., Rofiyanti, E., & Razikin, K. (2021). Local wisdom and regional policy in the implementation of friendly basic service Covid-19. *Ilomata International Journal of Social Science*, 2(3), 143–150. <https://doi.org/10.52728/ijss.v2i3.295>
- Sari, M. D. S., Saputro, A. R., Anas, M., Kunsah, B., & Futuwah, A. I. (2025). Pemberdayaan UMKM melalui pelatihan pendamping proses produksi halal pada pelaku usaha Kabupaten Lamongan. *Jurnal Pengabdian Inovasi Masyarakat Indonesia*, 4(2), 186–195. <https://doi.org/10.29303/jpimi.v4i2.7094>
- Sitorus, S. R. N., Berutu, P. A., Handayani, A., Ariansyah, M., & Wulandari, S. (2025). Peran mahasiswa sebagai agen perubahan dalam pelestarian lingkungan hidup: Studi kasus organisasi MAPASTA UINSU & mahasiswa FEBI UINSU. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, 4(3), 220–231. <https://doi.org/10.55606/jurrih.v4i3.5799>
- Susetyo, I. B. (2025). Strengthening the competence of planners through the integration of training evaluation, work motivation, and bureaucratic governance in improving the quality of development planning. *Jurnal Ilmiah Gema Perencana*, 4(2), 1819–1836. <https://doi.org/10.61860/jigp.v4i2.336>
- Susetyo, I. B. (2025). Strengthening the competence of planners through the integration of training evaluation, work motivation, and bureaucratic governance in improving the quality of development planning. *Jurnal Ilmiah Gema Perencana*, 4(2), 1819–1836. <https://doi.org/10.61860/jigp.v4i2.336>
- Susetyo, I. B., Handoko, V. R., & Widodo, J. (2023). Developing an Evaluation Model for Junior Planner Training to Enhance Planner Competency. *East Asian Journal of Multidisciplinary Research*, 2(11), 4361–4382. <https://doi.org/10.55927/eajmr.v2i11.6640>
- Susilowati, R., Khairunnas, K., Rafinzar, R., & Fadhlia, M. N. (2022). Analisis collaborative governance dalam penyelenggaraan musyawarah rencana pembangunan desa Sungai Rambutan. *Indonesian Governance Journal: Kajian Politik-Pemerintahan*, 5(2), 96–111. <https://doi.org/10.24905/igj.v5i2.66>
- Susniwati, & Yuliani, I. (2025). Model tata kelola kolaboratif dalam pengelolaan desa berkelanjutan di Indonesia. *Transparansi: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 8(2), 291–299. <https://doi.org/10.31334/transparansi.v8i2.5428>
- Vestikowati, E., Endah, K., & Hidayat, E. S. (2020). Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa melalui pelatihan administrasi pemerintahan di Desa Karangpaningal Kecamatan Tambaksari Kabupaten Ciamis. *Abdimas Galuh*, 2(2), 121–128. <https://doi.org/10.25157/ag.v2i2.3961>
- Wahyudin, I., & Susetyo, I. B. (2024). Implementasi kebijakan pengelolaan sampah melalui program bank sampah di Kecamatan Kelapa Gading Kota Administrasi Jakarta Utara. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 4(4), 310–319. <https://doi.org/10.31334/jiap.v4i4.4052>
- Wulandari, M., Novriyanti, T., Purwadhi, P., & Widjaja, Y. R. (2025). Implementasi strategi transformasi digital dalam meningkatkan kualitas pelayanan di rumah sakit: Studi kualitatif. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 5(1), 1415–1427. <https://doi.org/10.31004/innovative.v5i1.17847>